

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan besar – besaran antarpulau di seluruh Indonesia sudah terjadi sejak jaman penjajahan Hindia Belanda oleh VOC. Kebanyakan perdagangan ini dilakukan oleh ras Cina yang merantau ke Indonesia sebagai pedagang. Perdagangan antardaerah di Indonesia semakin berkembang dikarenakan munculnya pemekaran yang akhirnya menjadikan Indonesia terbagi menjadi 33 Propinsi dan 434 Kabupaten/Kota. Sangat menarik memang untuk melihat pola perdagangan antardaerah di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara terluas yaitu dengan luas wilayah 1.904.556 km², yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km.

Perdagangan antarregion terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang dimiliki oleh setiap region sehingga produk atau komoditi yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Oleh karena itu timbul istilah keterkaitan antarregion atau antardaerah di mana tidak semua input yang dibutuhkan untuk memproduksi output ataupun tidak semua output untuk dikonsumsi tersedia di dalam daerah sendiri, sehingga dibutuhkan dukungan dari daerah lain.

Besarnya ekspor dan impor antar Kabupaten/Kota dengan hasil industri utamanya, baik pertanian maupun manufaktur, dapat dilihat melalui perdagangan. Perdagangan yang terjadi antardaerah di Indonesia bukan hanya dipicu untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tetapi karena daerah penghasil sumber daya alam atau bahan mentah tidak memiliki pabrik untuk mengolah hasil alamnya tersebut. Oleh karena itu, bahan mentah tersebut diekspor ke daerah yang memiliki pengolahan yang selanjutnya mengolah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kurangnya pabrik pengolahan di suatu daerah menunjukkan tingkat investasi yang rendah di daerah tersebut.

Rendahnya investasi dikarenakan daya tarik investasi daerah yang lemah, seperti tingkat produktivitas daerah, ketersediaan infrastruktur, dan birokrasi dari pemerintah daerah. Semakin meningkatnya konsensus yang menyatakan bahwa

daerah merupakan unit spasial yang bersaing untuk menarik masuknya investasi, dan tingkat di mana transfer pengetahuan menyebar, mampu menghasilkan aglomerasi atau kluster dari perusahaan-perusahaan jasa dan industri.

Ketimpangan daya tarik investasi di Indonesia hingga saat ini juga masih dirasakan. Arifin Rudiyanto mengatakan bahwa Pulau Jawa masih mendominasi daya tarik penanaman modal di Indonesia karena daerah-daerah di Pulau Jawa memberikan tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) yang paling cepat dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia (Kompas, 27 Juni 2009, hal.19).

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik berupa hasil pertanian maupun hasil tambang atau galian. Sebagai contoh, Indonesia adalah penghasil utama beras, teh, kopi, rempah – rempah dan karet. Sedangkan hasil tambang utama Indonesia adalah gas alam, timah, tembaga, dan emas. Berdasarkan **Grafik 1-1** di bawah terlihat bahwa perekonomian regional masih di dominasi oleh sektor pertanian diikuti oleh sektor industri, perdagangan dan jasa lainnya. Di mana sektor pertanian mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja daripada sektor-sektor lainnya, yaitu 44,3 persen dari 95 juta orang tenaga kerja. Sedangkan sektor jasa mempekerjakan 36,9 persen, dan sisanya sektor industri sebesar 18,8 persen. Apabila kita melihat sumbangan daerah terhadap PDB, maka 60 persen PDB disumbangkan oleh Jawa, 15 persen oleh Sumatera, 1,17 persen oleh Papua dan selebihnya disumbangkan oleh Kalimantan dan Sulawesi.

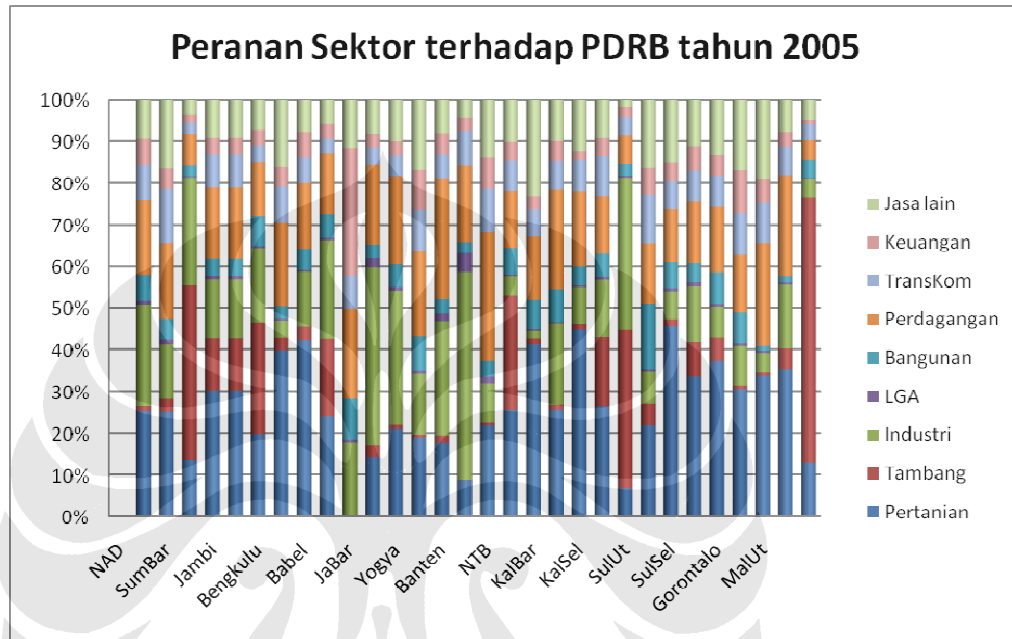
Dari keseimbangan ekspor dan impor Indonesia tahun 2005 memperlihatkan sektor industri memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspor non-migas Indonesia, yaitu sebesar 65 persen. Sedangkan sektor tambang dan pertanian hanya menyumbang 9,82 persen dan 3,33 persen terhadap ekspor non-migas. Untuk impor, barang konsumsi merupakan komoditas impor utama Indonesia, yaitu 19,7 persen. Besarnya nilai impor barang konsumsi disebabkan oleh meningkatnya impor makanan dan minuman yang diolah, bahan bakar dan pelumas olahan, dan barang semi tahan lama.

Meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi masih bergantung pada perdagangan internasional. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menyatakan bahwa nilai ekspor antarnegara dari tahun 2003 hingga 2005

Universitas Indonesia

terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan nilainya lebih besar daripada nilai ekspor antarpropinsi. Sedangkan untuk impor Jawa Barat, nilai impor antarpropinsi lebih besar daripada impor antarnegara.

Grafik 1-1. Peranan 9 Sektor terhadap PDRB tahun 2005



Sumber: BPS (hasil olahan)

Selanjutnya muncul pertanyaan mengenai bagaimana mengidentifikasi sektor-sektor potensial di setiap daerah? Analisis mengenai sektor potensial dalam ilmu regional cukup beragam, antara lain adalah analisis *forward* dan *backward linkage* (keterkaitan ke belakang dan ke depan), kemudian analisis *shiftshare* dan *location quotient*, analisis *feedback effect*, dan analisis angka pengganda. Oleh karena itu, dalam penjelasan berikutnya penulis akan menggunakan analisis angka pengganda (khususnya angka pengganda output) untuk mengetahui sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan daerah.

Kenyataan bahwa sebaran sumber daya alam yang berlimpah secara tidak merata juga terjadi pada sebaran sumber daya manusia yang merupakan “aktor” pembangunan ekonomi. Implikasi dari ketidakmerataan keberadaan kedua sumber daya tersebut adalah belum baiknya tingkat pelayanan infrastruktur wilayah

melayani kebutuhan wilayah dan masyarakat, terutama daerah-daerah terisolir dan tertinggal.

Terpisahnya satu wilayah dengan wilayah pusat menyebabkan terjadi ketimpangan dalam pertumbuhan antara pusat dan daerah. Semakin jauh daerah dari pusat maka pertumbuhan daerahnya semakin kecil. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Menurut Emilia dan Imelia (2006), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah, yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar wilayah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar wilayah.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru mengenai otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Menurut Undang – Undang tersebut, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak awal tahun 2001 memungkinkan setiap daerah otonom mengembangkan daerahnya masing-masing. Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 195 memungkinkan daerah melaksanakan kerjasama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan prinsip efisiensi, efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Pemekaran daerah adalah salah satu bentuk diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada awal tahun 2001. Sejak 1 Januari 2001 secara resmi diterapkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Proses desentralisasi ini sejalan dengan dan merupakan bagian dari paket proses demokratisasi. Melalui proses desentralisasi ini, pembuatan kebijakan yang menyangkut kehidupan kemasyarakatan ingin didekatkan kepada masyarakat. Jika sejumlah kebijakan kini dibuat di tingkat lokal, dan tidak lagi di tingkat nasional (atau pusat), maka kehidupan akan menjadi semakin demokratis.

Universitas Indonesia

Ini lah hakekat dari desentralisasi menuju otonomi daerah. Proses ini melibatkan perubahan besar dari pola pemerintahan dan pengelolaan masyarakat yang sangat sentralistik.

Semenjak pelaksanaan otonomi daerah, di beberapa daerah muncul Peraturan Daerah (Perda) yang berdampak negatif bagi perdagangan dalam negeri atau antardaerah. Salah satu contoh adalah Propinsi Lampung yang mengeluarkan 9 Perda yang mengenakan pungutan (retribusi) atas barang yang diperdagangkan ke luar propinsi dan berbagai pungutan di sektor perhubungan yang juga berpengaruh terhadap perdagangan. Munculnya Perda – Perda seperti ini mengancam *free internal trade* dan pada gilirannya menjadi ancaman bagi daya saing ekonomi Indonesia.

Selain penetapan Perda tentang pungutan, daerah juga mengalami kesulitan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan langkah awal berupa pemahaman pola permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa pada tingkat daerah sehingga mampu memajukan pembangunan ekonomi daerahnya dan daerah lain. Selanjutnya mencocokkan antara permintaan dari pihak pemerintah daerah dan penawaran dari para pengusaha di daerah tersebut.

Dampak lain yang muncul dari desentralisasi fiskal ini adalah tidak terealisasinya kelebihan dana yang ada untuk meningkatkan perekonomian daerah. Yang terjadi adalah Pemda memilih untuk membekukan kelebihan dana yang mereka miliki dalam bentuk Surat Berharga Bank Indonesia (SBI). Berdasarkan Antara News (2007), Bank Indonesia menyatakan sekitar Rp. 90 triliun dana pemerintah daerah dalam bentuk SBI dan sekitar 50 persen berasal dari Bank Pembangunan Daerah (Indriyani, 2008). Apabila dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan sektor-sektor potensial yang produktif, keuntungan yang didapat akan lebih besar.

Melimpahnya kekayaan alam tiap daerah di Indonesia memungkinkan peningkatan intensitas perdagangannya antardaerah, baik di pulau yang sama (*intraregional trade*) maupun di pulau yang berbeda (*interregional trade*). Dalam penelitian ini selanjutnya ingin melihat intensitas perdagangan di Indonesia, apakah *interregional trade* lebih intensif daripada *intraregional trade* atau

Universitas Indonesia

sebaliknya.

Dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tidak menyebutkan bahwa masalah perdagangan merupakan persoalan nasional, seperti halnya dengan masalah moneter dan fiskal. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan perdagangan bukan lagi menjadi wewenang pusat melainkan wewenang daerah. Ini juga berarti bahwa daerah (Propinsi atau Kabupaten/Kota) dapat menerapkan kebijakan yang memengaruhi perdagangan antar daerah, termasuk hambatan dalam perdagangan antar daerah. Seperti yang dipaparkan oleh Bratakusumah dan Solihin (2002), bahwa beberapa daerah dapat mengadakan kerja sama antardaerah yang diatur oleh keputusan bersama. Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama Antardaerah yang memungkinkan daerah mengadakan kerja sama dengan badan lain antardaerah (Janapria, 2008).

Dalam konsep pengembangan wilayah, pengaruh dari perkembangan ekonomi suatu daerah tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, melainkan juga terasa di daerah sekitarnya. Metzler (1950) mencoba menerangkan bagaimana peningkatan pendapatan di suatu wilayah (misalnya melalui tambahan input pemerintah), akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan wilayah lainnya. Perluasan pendapatan tersebut akan meningkatkan ekspor dan impor antardaerah yang selanjutnya memengaruhi keseimbangan perdagangan daerah. Tri Widodo (2006) menyebutkan, seberapa jauh keseimbangan perdagangan tersebut sangat tergantung pada ukuran angka pengganda antardaerah/*interregional multiplier* (Janapria, 2008).

Dalam penelitian ini juga penulis ingin membuktikan bahwa perdagangan intradaerah lebih dominan dibandingkan dengan perdagangan antardaerah. Dan pembuktian secara ekonometrika bahwa perubahan variabel eksogen, berupa faktor-faktor ekonomi, memengaruhi besar kecilnya nilai koefisien output dan angka pengganda output. Perubahan nilai koefisien output dan angka pengganda output tersebut juga dipengaruhi oleh intensitas perdagangan yang terjadi. Di mana intensitas perdagangan intraregional yang turun mengindikasikan ketergantungan intraregional yang semakin kecil sehingga perdagangan interregional meningkat.

1.2 Perumusan Masalah

Perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia dan perbedaan kebutuhan masyarakat menimbulkan perdagangan antardaerah tersebut. Perdagangan yang terjadi bukan hanya antardaerah di pulau yang sama (*intraregional trade*) tetapi juga antardaerah di pulau yang berbeda (*interregional trade*). Selain perbedaan teknologi yang telah dijelaskan di atas, jarak secara geografis ternyata memiliki peranan penting dalam menentukan aktivitas ekonomi yang terjadi.

Yang ingin dilihat melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana intensitas *interregional* atau *intraregional trade* di Indonesia tahun 2000 dan 2005?
2. Bagaimana *trend* struktur produksi setiap propinsi di Indonesia dari tahun 2000 dan 2005?
3. Variabel ekonomi apa saja yang memengaruhi nilai koefisien output?
4. Berapa besar penciptaan tambahan output yang dihasilkan oleh sektor lain apabila terjadi peningkatan permintaan akhir di sektor tertentu (*output multiplier*) dari tahun 2000 dan 2005? Dan variabel ekonomi apa saja yang memengaruhi angka pengganda output tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentunya penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Dengan begitu diharapkan penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan perdagangan antardaerah.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui intensitas perdagangan antardaerah di Indonesia, apakah lebih dominan *intraregional* daripada *interregional trade*.
2. Melihat distribusi struktur produksi dengan menggunakan data IRIO 2000 dan 2005.
3. Mengetahui variabel ekonomi yang memengaruhi interaksi atau perdagangan antardaerah.
4. Mengetahui perubahan angka pengganda output tahun 2000 dan 2005. Dan

Universitas Indonesia

variabel ekonomi yang memengaruhi perubahan angka pengganda output tersebut.

1.4 Hipotesis

Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka hipotesis yang digunakan adalah:

1. Perdagangan antardaerah di Indonesia lebih didominasi oleh perdagangan *intraregional* daripada perdagangan *interregional*. Namun, nilainya mengalami penurunan secara relatif.
2. Penurunan nilai *intraregional* menyebabkan distribusi struktur produksi berubah dari tahun 2000 dan 2005.
3. Adanya interaksi perdagangan antardaerah menyebabkan peningkatan permintaan antara suatu sektor, sehingga mengakibatkan output sektor lainnya juga meningkat (dampak langsung).

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis dengan metode Inter Regional Input Output (IRIO), yaitu tabel IRIO 2000 yang disusun oleh BAPPENAS dan IRIO 2005 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. IRIO adalah model Input-Output yang dikembangkan oleh Walter Isard (1951) untuk melihat interaksi yang terjadi antarregion. Saling keterkaitan antarregion adalah fakta yang tidak bisa dihindari karena yang terjadi di satu region mungkin akan berpengaruh kepada region lain. Semakin dekat dua region maka semakin besar intensitas interaksi yang mereka hasilkan. IRIO juga dapat diintegrasikan dalam subsistem perencanaan nasional dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi ekonomi regional yang berbeda di setiap propinsi atau pulau (atau region).

Nilai dari matriks transaksi pada tabel IRIO menunjukkan bagaimana pola perdagangan antar daerah di Indonesia. Dengan menggunakan tabel IRIO 2000 yang terdiri dari 30 propinsi, di mana setiap propinsi terdiri dari 30 sektor, dan IRIO 2005 yang terdiri dari 30 propinsi, di mana setiap propinsi terdiri dari 35 sektor, penulis akan dimudahkan apabila menggunakan *software* untuk melakukan

Universitas Indonesia

analisis Input Output, yaitu Python IO (PyIO). Dengan menggunakan *software* ini penulis akan melakukan agregasi sektor yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Penulis menggunakan tabel IRIO 2000 sebagai pembanding, untuk melihat intensitas perdagangan di Indonesia yang selanjutnya dapat melihat variabel ekonomi apa yang memengaruhi perubahan tersebut.

Untuk mengetahui keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan antardaerah, penulis akan melihat angka pengganda yang dihasilkan dalam model IRIO ini, yaitu angka pengganda output. Analisis angka pengganda mencoba melihat apa yang terjadi terhadap variabel-variabel endogen (yaitu output sektoral) apabila terjadi perubahan variabel-variabel eksogen (seperti permintaan akhir) dalam perekonomian. Angka pengganda output akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

Tabel IRIO memuat begitu banyak informasi atau data statistik regional, sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis faktor yang memengaruhi perubahan struktur produksi dan angka pengganda output, seperti data PDRB. Selain itu, penulis juga menggunakan data di luar tabel IRIO, yaitu tingkat inflasi setiap propinsi dan jumlah tenaga kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika penulisan ini dibagi ke dalam bab-bab yang mengacu pada kaidah penelitian ilmiah. Berdasarkan urutan-urutannya, skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang terdiri atas:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan topik, permasalahan penelitian, tujuan penulisan skripsi, dan sistematika penulisan yang memperlihatkan susunan Bab dalam makalah secara keseluruhan.

BAB 2. TINJAUAN LITERATUR

Bab ini menjelaskan konsep bagaimana pola dan volume *interregional trade* dan *intraregional trade*. Nanti akan terlihat faktor yang memengaruhi terjadinya perdagangan antar daerah dan apakah perdagangan tersebut memberikan keuntungan atau malah merugikan daerah tersebut.

Universitas Indonesia

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan skema perdagangan antar daerah dengan menggunakan metode Interregional Input Output (IRIO) dan Model Variabel Dummy untuk menyelesaikan persamaan ekonometrika.

BAB 4. ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan pola perdagangan dan interaksi antar daerah serta nilai angka pengganda. Dan menganalisis variabel ekonomi yang memengaruhi perubahan struktur produksi dan pengganda output.

BAB 5. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi dan saran.

